



# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH (DIKPLHD) KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024**

## **DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023**

### **Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)**

#### **I. Pendahuluan**

Program pemerataan pembangunan di Indonesia menghadapi tantangan besar karena luasnya wilayah dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan akan sumber daya alam, yang seringkali dieksploitasi tanpa memperhatikan kelestariannya. Hal ini diperparah dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Di Kabupaten Bantul, alih fungsi lahan yang pesat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, baik itu air, udara, maupun tanah. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan sangat mendesak untuk diintegrasikan dalam strategi pembangunan daerah.

Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga pilar utama: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ketiganya harus berjalan seiring untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang. Namun, dalam banyak kasus, aspek ekonomi sering mendapat prioritas lebih besar dibanding aspek sosial dan lingkungan. Padahal, dampak negatif terhadap lingkungan dapat menimbulkan biaya yang jauh lebih besar di masa depan, termasuk kerusakan ekosistem dan hilangnya biodiversitas. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan nilai-nilai eksternalitas lingkungan dalam perencanaan dan evaluasi ekonomi.

Dalam implementasi pembangunan berkelanjutan, pemerintah harus mengadopsi prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). Di Kabupaten Bantul, evaluasi terhadap pencapaian SDGs menunjukkan masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan, seperti penyediaan air bersih, energi bersih, dan produksi pangan yang berkelanjutan.

Tantangan lain termasuk pekerjaan yang layak, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan investasi yang tepat dan strategi mitigasi bencana serta adaptasi perubahan iklim, sehingga pembangunan dapat terus berlangsung tanpa merusak lingkungan.

Aktivitas manusia, mulai dari sektor pertanian, industri, hingga pariwisata, memberikan tekanan besar terhadap lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk memperburuk situasi ini, karena kebutuhan akan lahan dan sumber daya alam semakin meningkat. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan. Konservasi dan pelestarian lingkungan harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas pembangunan, untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya tersebut masih dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan ini menuntut pemerintah daerah untuk menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) setiap tahun. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2023, mengacu pada Pedoman Penyusunan Dokumen IKPLHD, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor S.113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022. DIKPLHD menyediakan data dan informasi yang akurat dan transparan tentang kondisi lingkungan hidup, yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan data yang valid, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Tujuan dari penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan ilmiah mengenai lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bantul sebagai acuan pengambilan kebijakan, dan perencanaan pembangunan
2. Menyediakan sumber informasi mengenai kondisi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bantul yang dapat diakses secara luas dan mudah oleh berbagai pihak yang terkait demi pembangunan dan kemakmuran masyarakat
3. Menyediakan sarana pemantauan kinerja pemerintah atas upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi permasalahan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup bagi berbagai pihak di wilayah Kabupaten Bantul
5. Menyediakan informasi akurat bagi peringatan dini terhadap potensi permasalahan lingkungan hidup, yang dapat mendorong dilakukannya evaluasi dan langkah-langkah antisipasi.

## **II. ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

Aspek utama dalam kerangka DPSIR yang akan dianalisis, yaitu:

1. Faktor penggerak tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup (*driving force*) beberapa faktor penggerak antara lain faktor sosial kependudukan seperti pertumbuhan penduduk dan kemiskinan.
2. Indikator tekanan terhadap lingkungan (*pressure*) berupa aktivitas/kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam yang akan menimbulkan tekanan lingkungan dan merubah keadaannya.
3. Kondisi lingkungan hidup dan kecenderungannya (*state*), Indikator ini menggambarkan kondisi kualitas dan kuantitas sumber daya alam

dan lingkungan yang merupakan prediksi situasi, kondisi dan pengembangannya di masa depan.

4. Setiap kegiatan atau aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam akan berdampak (*impact*) terhadap lingkungan.
5. Respon (*response*) masyarakat terhadap perubahan ini pada tingkat yang berbeda dalam bentuk aturan/legislasi baru, teknologi baru, perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat, dan reformasi ekonomi.

Dalam laporan ini, analisis D-P-S-I-R akan dilakukan untuk 3 isu lingkungan prioritas yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Tata Guna Lahan
2. Kualitas Air
3. Kualitas Udara
4. Resiko Bencana
5. Perkotaan
6. Tata Kelola

## **A. TATA GUNA LAHAN**

### **Driving Force**

- a. Jumlah penduduk semester 2 tahun 2023 tercatat sebanyak 972.161 jiwa yang terbagi menjadi penduduk perempuan sebanyak 528.850 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 443.311 jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata mencapai 1,55 % dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebanyak 957.352 jiwa.
- b. Pertumbuhan yang terlihat signifikan berada di bagian utara seperti Banguntapan, Bantul, Bangunharjo, Panggungharjo, dan Ngestiharjomenjadi fokus urbanisasi yang cepat dikarenakan wilayah-wilayah ini berdekatan dengan Kota Yogyakarta dan dilalui oleh jaringan jalan penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
- c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 19.075 Ha, yang terbagi menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), luas LSD yang direncanakan (14.146,5 Ha) masih berada di bawah luas LSD yang disepakati (13.355,05 Ha) atau hanya mencapai sebesar 94,4% dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Bantul Tahun 2023.

- d. Laju pertumbuhan tahun 2023 ekonomi skala nasional sampai dengan regional Kabupaten Bantul mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 0,24%. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul dari tahun 2018 sampai dengan 2023 cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ketahun dengan sektor pertambangan dan penggalian mencatatkan pertumbuhan terendah sebesar 1,58%, sementara Sektor Transportasi dan Pergudangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,99%.

### **Pressure**

- a. Pergeseran fungsi lahan sawah irigasi dan tadah hujan tahun 2023 mencapai 14,04 Ha yang berpotensi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan, ketidakseimbangan ekosistem, serta bertambahnya jumlah buruh tani yang kehilangan pekerjaan, yang pada gilirannya meningkatkan angka urbanisasi.
- b. Pertumbuhan ekonomi pada sektor Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Bantul meningkat sebesar 0,85%, seiring dengan peningkatan kawasan permukiman sebesar 33% dari tahun sebelumnya.
- c. Daya dukung dan daya tampung permukiman di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung permukiman yang cukup untuk seluruh kapanewon masih belum terlampaui.
- d. Destinasi wisata tidak berizin di Kabupaten Bantul merupakan permasalahan serius yang perlu diperhatikan secara mendalam. Dalam kajian ini, Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Dinas

Pariwisata, menghadapi tantangan besar terkait pendataan ulang desa wisata yang tidak memiliki status yang jelas.

- e. Data kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2023 menunjukkan angka yang mengesankan, yaitu mencapai 2.701.842 orang. Dari segi kontribusi terhadap PAD, sektor pariwisata berhasil menyumbangkan sejumlah Rp 26.513.473.000.

### **State**

- a. Penggunaan lahan yang paling luas adalah kawasan permukiman, dengan luas mencapai 23760.50 hektar, diikuti oleh sawah irigasi seluas 12261.67 hektar, dan kebun campuran seluas 6407,77 hektar. Penggunaan lahan sawah irigasi menempati posisi kedua dengan luas sekitar 12261.67 hektar, dengan sebaran yang merata ke arah selatan mengikuti kelerengan landai dan bentuklahan dataran alluvial yang baik untuk pertanian.
- b. Realisasi nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2021 - 2023 terhadap target RPJMD Kabupaten dapat tercapai.
- c. Keanekaragaman sumberdaya hutan di Kabupaten Bantul cukup tinggi.
- d. Keberadaan TPAS Piyungan dengan kondisi yang telah mengalami kelebihan kapasitas penampungan (overcapacity). Jumlah sampah yang diangkut dari Kabupaten Bantul ke TPST Piyungan hingga tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya peningkatan produksi sampah oleh masyarakat. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah sampah yang masuk ke TPA Piyungan dari Kabupaten Bantul dari bulan Januari hingga Juni, dengan rata-rata 170,273 ton per hari.
- e. Pemanfaatan bukaan lahan yang belum optimal khususnya pada jenis tambang, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan ketersediaan sumber daya.

### **Impact**

- a. Produktivitas tanaman padi sawah, padi ladang, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami penurunan yang signifikan. Produktivitas padi sawah pada tahun 2022 mencapai 66,93 Kw/Ha namun menurun menjadi 61,92 Kw/Ha pada tahun 2023, sementara produktivitas ubi kayu pada tahun 2022 mencapai 140,93 Kw/Ha namun turun drastis menjadi 0,00 Kw/Ha pada tahun 2023.
- b. Menimbulkan Bencana pada Bangunan yang Berada di Kawasan Bencana. Alih fungsi lahan seperti ini dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada bangunan di daerah tersebut, terutama saat terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau tanah longsor.
- c. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa di beberapa Kapanewon. Potensi kerusakan tanah tinggi terletak di beberapa Kapanewon meliputi, Imogiri, Dlingo, dan Kretek dengan luasan sebesar 985,99 Ha. Luas lahan yang menjadi fokus penelitian adalah sebesar 37111,07 Ha.
- d. Berdasarkan survei dan analisis laboratorium yang telah dilakukan dengan pemetaan dan penilaian, ditemukan bahwa Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori kerusakan ringan berdasarkan acuan PP No. 150 Tahun 2000.
- e. Erosi aktual di lapangan, ditemukan bahwa ada 10 lokasi yang mengalami erosi nyata. Sebagian besar erosi ini berjenis erosi alur dan percik. Kehilangan lahan untuk pertumbuhan biomassa paling signifikan terjadi pada lahan dengan tingkat kerusakan rendah (61,57%) dan sedang (35,22%).
- f. Kabupaten Bantul memiliki luas lahan kritis di kawasan hutan pada tahun 2023 mencapai 113,62 ha, dengan Kapanewon Dlingo menjadi wilayah yang memiliki lahan kritis paling luas.
- g. Timbulan sampah di bahu jalan akibat penutupan TPAS Piyungan

### **Response**

- a. Upaya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b. Rekomendasi praktik pertanian berkelanjutan dan konservasi dengan mempertimbangkan parameter-parameter yang terpengaruh oleh kerusakan tersebut
- c. Upaya Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bantul melalui konservasi hutan, mangrove, flora dan fauna endemik serta penetapan regulasi kawasan cagar alam Imogiri dan konservasi kawasan pesisir (SK Bupati Bantul No. 284 Tahun 2014).
- d. Upaya pengurangan sampah pendekatan teknologi daur ulang dan pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat. Dengan adanya TPS 3R, jumlah sampah yang dapat dikelola telah meningkat signifikan pada tahun 2023, mencapai 45.128 ton/hari dengan presentase sampah terkelola sebesar 59,76%.
- e. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, melalui Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2023 ini telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH) layak anak dan penanganan pohon rindang.

## **B. KUALITAS AIR**

### **Driving Force**

- a. Pertumbuhan penduduk yang signifikan dari tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,55% dari tahun 2023 yang mencapai 957.352 jiwa. Perubahan demografis ini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk tingkat konsumsi sumber daya dan kepadatan penduduk.

- b. Kunjungan wisatawan tahun 2023 yang sama tercatat ada 798.845 orang yang berkunjung ke Kabupaten Bantul, dengan sekitar 95,81% merupakan wisatawan domestik dan sisanya (4,19%) adalah wisatawan asing. Pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Bantul juga membawa dampak terhadap timbunan limbah padat (sampah) dan limbah cair, yang memiliki implikasi penting bagi lingkungan.
- c. Kondisi hidrogeologi yang bervariasi berakibat pada ketersediaan air di Kabupaten Bantul cukup memadai. Namun, masih terdapat beberapa wilayah di Kapanewon yang sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan air yang layak digunakan, dengan masalah kekeringan dan banjir yang menjadi kendala dalam manajemen sumber daya air.
- d. Dukungan politik, kebijakan yang bijaksana, dan implementasi hukum yang tepat dapat memberikan landasan yang kokoh untuk pengelolaan air yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik serta lingkungan.

### **Pressure**

- a. Peningkatan aktivitas pembangunan untuk permukiman, perdagangan, jasa, dan industri telah menjadi faktor utama yang berkontribusi pada perubahan lahan dari pertanian menjadi non-pertanian. Aktifitas domestik, pertanian, dan peternakan yang dapat berdampak pada pencemaran lingkungan.
- b. Ketidaktaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan yang dilihat dari hasil pengawasan tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 25 pelaku usaha (83,33%) dinyatakan tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
- c. Terdapat peningkatan jumlah sarana prasarana sanitasi dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022, total kepemilikan sanitasi mencapai 96,92% di 17 Kapanewon. Namun

masih ada keterbatasan sarana BAB yang layak dan belum sesuai dengan SNI.

- d. Perilaku masyarakat yang masih pembuangan limbah domestik di sepanjang aliran sungai.

### **State**

- a. Rerata penurunan muka air tanah (MAT) selama satu tahun sebesar 3,72%, dengan variasi tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 4,35%. Namun, secara keseluruhan, penurunan MAT pada tahun tersebut masih berada di bawah 20%.
- b. Rasio pengusahaan air tanah di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara volume pengusahaan air tanah dan cadangan dinamis air tanah yang tersedia. Akumulasi volum pengusahaan air tanah di Kabupaten Bantul sepanjang tahun 2023 mencapai 4.123.463,15 meter kubik.
- c. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 39,33 diperoleh dari perhitungan hasil pemantauan terhadap 120 pemantauan untuk 3 periode pemantauan di 45 lokasi di Kabupaten Bantul. Dari hasil perhitungan ini, diketahui bahwa kondisi mutu air kelas Memenuhi Baku Mutu hanya terjadi pada 7 pemantauan (atau 5,83%), sedangkan Cemar Ringan terjadi pada 53 pemantauan (44,17%), Cemar Sedang pada 52 pemantauan (43,33%), dan Cemar Berat pada 8 pemantauan (6,67%).
- d. Pemantauan dan pengukuran pH air hujan di wilayah industri menunjukkan angka 5,16, yang masih berada di bawah rentang nilai untuk air higienis sanitasi (6,5-8,5). Namun, semua parameter lainnya sudah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan, sehingga kualitas air di sumur-sumur Kabupaten Bantul masih dianggap baik dan aman untuk digunakan oleh warga.

- e. Hasil analisis Embung Baturetno berada di Dusun Wiyoro, Kelurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan Luasnya mencapai 0,8 hektar terdapat 2 parameter yang tidak sesuai dengan baku mutu terjadi di embung ini, yaitu untuk parameter Fecal coliform dan Total coliform yang sanga tidak memenuhi baku mutu yang ada dengan masing-masing nilai yaitu  $>1.600$  MPN/100 ml.
- f. Pengukuran kualitas air laut, ditemukan bahwa beberapa parameter masih melebihi baku mutu yang ditetapkan, seperti TSS, sianida, dan lapisan minyak.

### **Impact**

- a. Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Bantul tahun 2023, realisasi terhadap target tersebut tidak dapat terpenuhi. Faktor utama penyebab peningkatan kategori Indeks Pencemaran menjadi Cemar Berat adalah konsentrasi Fecal Coliform yang tinggi.
- b. Pencemaran air oleh bakteri E. Coli merupakan salah satu bakteri yang dapat menyebabkan diare jika terdapat dalam air minum yang tercemar. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa terdapat 74.381 diare dengan usia dominan pada 1-4 tahun.
- c. Sungai Progo dan Oyo di Kabupaten Bantul merupakan sumber air penting bagi masyarakat, terutama sebagai bahan baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun, penggunaan intensif tersebut juga menyebabkan sungai-sungai ini menerima limbah dari berbagai kegiatan, mengakibatkan perubahan kualitas air.
- d. Perubahan iklim telah memperparah momen ekstrim hidrologi, seperti kekeringan, yang menyebabkan krisis air semakin memburuk mengakibatkan peningkatan pengeluaran masyarakat terhadap sumberdaya air.

### **Response**

- a. Kabupaten Bantul telah mengimplementasikan aturan yang mengharuskan usaha/kegiatan untuk membangun Sumur Peresapan Air Hujan (SPA) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan. Kewajiban Program Membangun Sumur Peresapan Air Hujan
- b. Kegiatan Gropyok Sampah di Sungai
- c. Regulasi dan monitoring kualitas air secara berkala dan berkesinambungan. Penyusunan persetujuan teknis (Pertek) pemenuhan baku mutu air limbah sebagai bagian dari persyaratan untuk mengajukan dokumen lingkungan dalam kategori UKL-UPL/AMDAL telah diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul
- d. Pelatihan pemanenan air hujan oleh kelompok masyarakat dengan memperkenalkan alat bernama Gama Filter Rain yang berfungsi menampung dan menyaring air hujan sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau sebagai cadangan air tanah.

## **C. KUALITAS UDARA**

### **Driving Force**

- a. Jumlah kendaraan bermotor meningkat dari 457.242 unit menjadi 509.134 unit, naik sebesar 11,35% pada tahun 2023. Pertumbuhan kendaraan bermotor ini berpotensi meningkatkan emisi polutan udara, mengurangi kualitas udara, dan lingkungan.
- b. Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (*humid tropical climate*).
- c. Rata-rata curah hujan bulanan di Bantul adalah 107,38 mm pada 12 stasiun pengamatan, dan bulan paling tinggi curah hujan nya

adalah bulan Januari, Februari, dan Maret dengan kondisi suhu udara relative konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata yakni berkisar 26,37 derajat Celsius.

### **Pressure**

- a. Meningkatnya aktivitas masyarakat secara langsung berimbas kepada peningkatan kebutuhan akan transportasi. Peningkatan tersebut berdampak pada jumlah polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.
- b. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul secara keseluruhan mencapai rata-rata 1,55% dari tahun sebelumnya, yang pada tahun 2022 berjumlah 957.352 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini berdampak langsung pada perubahan lahan, di mana banyak lahan hijau beralih fungsi menjadi pemukiman. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Kabupaten Bantul menjadi sorotan utama karena dampaknya terhadap polusi udara.

### **State**

- a. Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2023 yang berarti meningkatnya kualitas udara di Bantul. IKU tahun 2023 juga melebihi dari target Kabupaten sebesar 87.5. Indeks Kualitas Udara sebesar 88.16 termasuk dalam kategori baik, yang berarti kualitas udara di Kabupaten masih dalam kategori baik.
- b. Hasil pengukuran kualitas udara ambien di Kabupaten Bantul masih relatif baik dengan 2 parameter yang diuji semuanya tidak ada yang melampaui baku mutu sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

- c. Luas kelas jasa pengaturan kualitas udara di Kabupaten Bantul didominasi oleh Kelas tinggi dan rendah dengan masing-masing luas sebesar 16.714,65 ha dan 16.716,78 Ha.

### **Impact**

- a. Gangguan kesehatan masyarakat terutama saluran pernapasan yang dapat dilihat dari jumlah penyakit TB Paru yang mencapai 11.815 kasus.
- b. Emisi Gas Rumah Kaca Akibat Mobilisasi Penduduk
- c. Pencemaran udara yang mengakibatkan semakin menipisnya lapisan ozon di bumi dapat memberikan dampak serius pada lingkungan

### **Response**

- a. Pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak pemantauan kualitas udara secara periodik. Pelaksanaan sampling dan uji laboratorium untuk menilai kualitas udara ambien dalam Program Langit Biru (Prolabir) dilakukan dalam 2 periode yang berbeda, yaitu saat musim penghujan dan musim kemarau
- b. Optimalisasi fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- c. Pemantauan kualitas air hujan

## **D. RiSIKO BENCANA**

### **Driving Force**

- a. Pertumbuhan signifikan populasi di Kabupaten Bantul, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 1,55% dari tahun sebelumnya,

memperlihatkan adanya perubahan demografis yang substansial. Laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi merupakan faktor pendorong yang berpotensi meningkatkan risiko bencana baik alam maupun non-alam.

- b. Kondisi geologi dan morfologi Kabupaten Bantul dimana Kabupaten Bantul dilalui Sesar Opak yang merupakan pemicu gempa bumi di darat.
- c. Kondisi morfologi perbukitan membuat sebagian daerah seperti di Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Piyungan berpotensi tanah longsor. Sedangkan untuk daerah pantai seperti Kapanewon Kretek berpotensi untuk terjadinya banjir rob.

### **Pressure**

- a. Risiko bencana di Kabupaten Bantul terdapat dua bencana dengan risiko tinggi yaitu banjir dan kebakaran hutan/lahan. Sedangkan risiko bencana sedang meliputi, gempa bumi, tsunami, gelombang esktrim dan abrasi, cuaca ekstrim, dan kekeringan.

### **State**

- a. Kejadian bencana selama tahun 2023 total kejadian sebanyak 934 kali. Tercatat 6 (enam) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Bantul Bencana tersebut adalah banjir, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan, gempa bumi, angin kencang dan pohon tumbang.
- b. Seluruh kejadian tersebut dengan ketiga bencana terbesar yang paling banyak dialami yaitu, bencana angin kencang, kebakaran, dan pohon tumbang.

- c. Kelas jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana didominasi oleh kelas tinggi sebesar 15.312,65 ha

### **Impact**

- a. kerugian material dan sosial psikologis akibat bencana alam. Kerugian material yang signifikan terjadi pada kejadian kebakaran dengan estimasi kerugian mencapai Rp24.289.575.000,00.
- b. Bencana alam juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Salah satu penyakit dampak bencana banjir adalah leptospirosis dan diare.

### **Response**

- a. Pendekatan Budaya Sadar Bencana Melalui Kesenian Kethoprak merupakan inisiatif yang menarik dan berpotensi besar untuk merespons bencana serta meningkatkan edukasi kebencanaan di Kabupaten Bantul.
- b. Progam penurunan risiko bencana di Kabupaten Bantul, yaitu Sekolah Aaman Bencana berjumlah 25 sekolah, Destana (Desa Tangguh Bencana) berjumlah 35 Desa, dan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) berjumlah 14 personil.
- c. Pendampingan dalam penyusunan rencana kedaruratan bahaya kebakaran oleh Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan #Damkarmat BPBD Kabupaten Bantul
- d. Progam penurunan risiko bencana di Kabupaten Bantul, yaitu Sekolah Aaman Bencana berjumlah 25 sekolah, Destana (Desa Tangguh Bencana) berjumlah 35 Desa, dan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) berjumlah 14 personil.
- e. Upaya merespon bencana pemerintah melakukan pendekatan Masyarakat Siaga Tsunami, yang bertujuan untuk menciptakan komunitas yang siap dan tanggap terhadap ancaman tsunami.

## **E. PERKOTAAN**

### **Driving Force**

- a. Perkembangan penduduk perkotaan menjadi semakin tinggi. Dominasi penduduk kawasan perkotaan seperti Kapanewon Banguntapan, Kasihan, dan Sewon yang menyumbang 33,53% dari total populasi Kabupaten Bantul. Mobilitas tinggi di wilayah ini disebabkan oleh fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai.
- b. Pola persebaran jumlah penduduk cenderung tidak merata. Beberapa Kapanewon yang dekat dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) jumlah dan kepadatan penduduk yang lebih tinggi.

### **Pressure**

- a. Tata kelola sampah yang belum optimal, pada tahun 2023 tercatat 7 laporan mengenai sampah liar, 4 laporan tentang pembakaran sampah baik organik maupun anorganik, serta 2 laporan lainnya terkait sampah liar.
- b. Obyek wisata di Kabupaten Bantul sangat beragam baik berupa Desa Wisata, Wisata Pantai, Wisata Religi, Wisata Pertanian, dan lainnya. Kegiatan inipun tidak lepas sebagai sumber penghasil limbah, baik limbah padat, limbah cair, maupun limbah B3.

### **State**

- a. Kondisi jumlah penduduk yang tercatat di Kabupaten Bantul adalah 972.161 jiwa, dengan asumsi potensi timbulan sampah menurut laporan jakstrada 2023 adalah 0,458 kg/hari, maka produksi sampah di Kabupaten Bantul adalah 445,7948 ton perhari. Komposisi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bantul menurut KLHK (2023) mencapai 60,54% berasal dari rumah

tangga merupakan sampah sisa makanan, jenis sampah terbesar kedua yaitu sampah plastik yang mencapai 24,33%.

- b. Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumur pada sepanjang tahun 2023 mencapai 129.185 rumah tangga dengan penggunaan tertinggi terdapat di Kapanewon Sewon. Penggunaan air ledeng/PDAM di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebesar 7.601 rumah tangga dengan pemanfaatan tertinggi di Kapanewon Dlingo yang merupakan daerah sulit air bersih. Aksesibilitas sarana sanitasi pada tahun 2023 di Kabupaten Bantul dari 265.099 KK, yang menggunakan tempat buang air besar sendiri sejumlah 259.260 KK atau mencapai 97,79%.
- c. Luas kelas jasa penyedia air bersih di Kabupaten Bantul didominasi oleh kelas sangat tinggi, yaitu sebesar 14.581,42 Ha.

### **Impact**

- a. Produksi limbah perkotaan yang meningkat dengan instansi penghasil volume limbah cair terbesar yaitu RSUD Panembahan Senopati, Bantul pada tahun 2023 sebanyak 125,85 ton/tahun yang semuanya sudah dimusnahkan karena masuk dalam kategori Limbah B3.
- b. Gangguan penyakit dan kesehatan masyarakat dengan jenis penyakit yang paling sering dialami penduduk di wilayah perkotaan adalah stroke, hipertensi, diabetes melitus dan ISPA.

### **Response**

- a. Optimalisasi dalam rangka pengurangan volume timbulan sampah di TPA Piyungan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pendampinga pengelolaan sampah dan optimalisasi peran Bank Sampah serta TPS3R.

- b. Patroli lingkungan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampah. Patroli ini dilaksanakan khusus pada jam-jam tertentu dan tempat-tempat tertentu yang sekiranya berpotensi terjadinya pembuangan sampah liar cukup besar di sepanjang jalan protokol di 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul.
- c. Upaya untuk menerapkan pengelolaan limbah B3 yang baik dan benar dapat dilakukan dengan menerapkan perizinan pengelolaan di bidang limbah B3. Berdasarkan kewenangan, Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai kewenangan memberikan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpul Limbah B3 skala kabupaten.
- d. Program Pesantren Ekonomi Madani Atasi Sampah (Pesantren Emas)

## **F. TATA KELOLA**

### **Driving Force**

- a. Anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 41.326.625.734. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup. Pada akhirnya, realisasi belanja yang terjadi mencapai 94,57% dari total anggaran
- b. Laju pertumbuhan ekonomi baik skala nasional maupun regional di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,24%. Selama periode dari tahun 2018 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

### **Pressure**

- a. Berbagai jenis aduan yang di kirimkan akibat dari berbagai kegiatan usaha yang meliputi 25 aduan dari masyarakat dengan rincian aduan pencemaran udara akibat industri, sampah, dan kandang babi sebanyak 15 aduan, persampahan sebanyak 7 aduan, dan kasus pencemaran air sebanyak 3 aduan. Total sejumlah 24 aduan tersebut, proses penyelesaian aduan semuanya sudah ditindaklanjuti oleh DLH Kabupaten Bantul

### **State**

- a. Jumlah staff personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang aktif sampai dengan saat ini sebanyak 87 personil, berdasarkan tingkat pendidikan adalah adalah SLTA sebanyak 50 orang, Diploma sebanyak 4 orang, Sarjana S1 sebanyak 24 orang, dan Master/S2 sebanyak 9 orang. Pejabat dan staf lingkungan hidup di DLH Kabupaten Bantul, tercatat 4 orang pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) yang sudah melakukan diklat
- b. LSM lingkungan hidup juga banyak berdiri di Kabupaten Bantul, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 18 LSM, 12 di antaranya tercatat telah memiliki Akta Pendirian.
- c. Efisiensi belanja Dina Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebesar 3,14% dari total anggaran belanja yang telah dialokasikan. Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama mencapai 3,43%, sementara itu efisiensi untuk program/kegiatan pendukung mencapai 2,59%.

### **Impact**

- a. Tingginya limbah produksi perkotaan yang dapat dilihat dari jumlah limbah B3 padat sebesar 125,86 ton per tahun dan limbah B3 cair sebesar 22,43 meter kubik per tahun, permasalahan tata kelola limbah di Kabupaten Bantul menjadi semakin kompleks.
- b. Gangguan kesehatan masyarakat.

### ***Response***

- a. Pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup, dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul pada tahun 2023 telah menerbitkan ijin lingkungan sebanyak 30 ijin dokumen UKL-UPL OSS. Sedangkan hasil pengawasan pada tahun 2023 terhadap 29 usaha atau pemrakarsa didapatkan hasil perusahaan/pemrakarsa yang taat sebesar 16,67% atau 5 perusahaan, dan yang tidak taat sebesar 83,3% dengan jumlah 24 perusahaan.
- b. Kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat
- c. Pemberian penghargaan pengelola lingkungan hidup
- d. Pelestarian kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup

### **III. PENENTUAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

**Langkah Persiapan** yang meliputi *review literatur* yakni kajian terhadap pustaka dan konsep-konsep pengelolaan lingkungan yang telah ada. Selanjutnya dilakukan pembentukan tim penyusun dokumen dan tenaga ahli Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kab. Bantul yang disahkan melalui Surat Keputusan Bupati.

**Langkah pelaksanaan** yang meliputi identifikasi dan pengumpulan data pendukung baik data Primer maupun sekunder. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung di lapangan sesuai dengan kebutuhan kajian. Tahap selanjutnya yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) dan Rapat Koordinasi awal dengan tim penyusun DIKPLHD.

**Langkah penyusunan** yang meliputi kompilasi data, analisis data, dan penyajian dokumen DIKPLHD. Kompilasi data dilakukan terhadap seluruh data, baik data sekunder maupun data primer. Pemilahan data berdasarkan isu-isu yang dirangkum dalam *Focus Group Discussion* (FGD).

Hasil dari *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan, menghasilkan ketetapan isu lingkungan prioritas yang akan menjadi landasan utama dalam pembahasan inovasi pemerintah daerah Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Sampah Belum Optimal
2. Dinamika alih fungsi lahan
3. Penurunan kualitas air

#### **IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANTUL**

Upaya inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Bantul meliputi kegiatan atau program sebagai berikut:

1. Produk Hukum Bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
2. Sinergitas Regulasi dengan Fasilitas Penunjang Persampahan
3. Inovasi AKSI MESRA
4. Bantul Bersama (Bantul Bersih Sampah 2025) dan Dikal
5. Inovasi Produk Hukum Dalam Bidang Lingkungan
6. Pelestarian Kearifan Lokal Labuhan dan Merti Dusun
7. Program Konservasi Sumber Daya Air
8. Program Kegiatan Gropyok Sampah
9. Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste (TPS3R)
10. Pesantren EMAS (Ekosistem Madani Atasi Sampah)
11. Pelatihan Pemanenan Air Hujan

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Bantul terjadi penurunan signifikan luas lahan sawah irigasi dari 172,17 Ha (2019) menjadi 67,38 Ha (2023), akibat pembangunan permukiman, perdagangan, jasa, dan industri. Dampaknya adalah penurunan produksi pangan, ketidakseimbangan ekosistem, dan peningkatan pengangguran di sektor pertanian.
2. Kualitas air sungai meningkat tetapi belum mencapai target, dengan nilai 39,86. Penyebab utamanya adalah tingginya perilaku masyarakat yang membuang sampah dan limbah domestik ke sungai. Sungai-sungai seperti Bedog, Gajah Wong, Code, dan Winongo memiliki parameter kualitas air yang masih melebihi baku mutu. Upaya peningkatan dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, program pengelolaan sampah, dan pembangunan SPAH.
3. Indeks Kualitas Udara (IKU) di Bantul mengalami kenaikan dari 2021 hingga 2023, mencapai nilai 88.16 yang termasuk kategori baik dan melebihi target Kabupaten. Konsentrasi N02 dan SO2 di udara menurun, meningkatkan kualitas udara di Bantul.
4. Kejadian bencana pada tahun 2023, Kabupaten Bantul mengalami berbagai bencana, termasuk gempa bumi (15 kali), tanah longsor dan erosi (61 kali), banjir (1 kali), pohon tumbang (85 kali), dan angin kencang (415 kali). Dampaknya meliputi kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta keselamatan dan kesejahteraan penduduk.
5. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul terdapat 354 Bank Sampah, masalah sampah belum terselesaikan sepenuhnya karena TPA Piyungan telah melebihi kapasitasnya. Pada tahun 2023, pengelolaan sampah mencapai 63,94% dari target

65,51%, berkat kolaborasi berbagai pihak dan peningkatan sarana pengelolaan sampah.

6. Kepatuhan perusahaan Pada tahun 2024, hanya 17,24% dari 29 perusahaan di Bantul yang taat terhadap peraturan lingkungan. Upaya dilakukan melalui pengawasan, pembinaan, dan program lingkungan hidup dengan harapan meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.
7. Kebijakan terkait lingkungan hidup sepanjang tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan 17 produk hukum terkait lingkungan, termasuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### **Rencana Tidak Lanjut**

1. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sekber Kartamantul dalam upaya peningkatan kualitas air sungai.
2. Pendampingan, sosialisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli sungai, serta pembinaan terhadap penataan ijin usaha pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
3. Pemantauan terhadap pencemaran air sungai harus lebih diperketat agar tidak ada yg membuang limbah sembarangan karena berdasarkan data kualitas air sungai yang sangat tercemar.
4. Memperhatikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul terutama terkait pengelolaan sampah karena

TPA Piyungan merupakan akumulasi sampah yang berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

5. Memantau dan mengintensifkan kinerja bank sampah dan rumah pilah sampah karena banyak bank sampah yang belum terpantau kegiatannya.
6. Perencanaan reklamasi kawasan (penanaman tanaman di bekas tambang, mangrove), menambah luasan hutan kota, taman kota dan hutan rakyat untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
7. Perencanaan dan pemanfaatan penggunaan lahan sesuai dengan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga terwujud berwawasan lingkungan dan kebencanaan
8. Menambah anggaran bidang pengelolaan lingkungan hidup, terutama yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran air sungai, pengelolaan persampahan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
9. Menggiatkan dan menguatkan kelembagaan kelompok pengelola sampah di tiap Kalurahan, serta peningkatan peran BUMKal dalam penanganan sampah.
10. Menambah produk hukum bidang lingkungan hidup yang terkait pembatasan perubahan fungsi lahan, limbah cair dan limbah padat atau persampahan
11. Penguatan sinergitas antar pemangku wilayah dalam pengelolaan lingkungan